



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara agar dapat hidup secara layak, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2024-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

#### Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk memenuhi pencapaian Target dan sasaran pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Penerapan SPM serta penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah.
- (3) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

#### Pasal 3

- (1) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - c. Bab III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - d. Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
  - e. Bab V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM

#### Pasal 5

Bupati dalam penerapan SPM di Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Daerah yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM Daerah Provinsi Jawa Barat.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Laporan Penerapan SPM menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi muatan Laporan Penerapan SPM paling sedikit terdiri atas:
  - a. hasil penerapan SPM;
  - b. kendala penerapan SPM; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Perangkat Daerah atau Unit Kerja pengampu SPM melaporkan penerapan SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan dan Perangkat Daerah terkait, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata pemerintahan menyusun laporan hasil pencapaian SPM Daerah untuk disampaikan Bupati kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Sumber pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2029 bersumber pada:

- a. APBD; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 2 - 2025  
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 2 - 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2025 NOMOR 23



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan **Peraturan Bupati Garut tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2024 – 2029** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Standar Pelayanan Minimal sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat,

Dalam memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan pemetaan guna merencanakan penerapan SPM jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan harapan dengan adanya perencanaan tersebut pemerintah daerah dapat memenuhi dan melaksanakan rencana tersebut sehingga penerapan SPM dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tentunya dapat memenuhi hak dari setiap masyarakat untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian rencana aksi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih seraya berharap semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kabupaten Garut kearah yang lebih maju, senantiasa memperoleh petunjuk serta ridho Allah SWT. ***Amin Ya Robbal ‘alamiin.***

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024-2029

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas – luasnya. Secara konsepsional pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis dan keadilan salah satu wujudnya melalui pelaksanaan urusan Pemerintahan yang tepat sasaran.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan Pemerintahan absolut dan ada urusan Pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak – hak konstitusional masyarakat.

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan Data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penjurusan rencana pemenuhan pelayan dasar, dan
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, SPM harus dijadikan sebagai prioritas belanja daerah. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Guna mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut yang berpedoman pada prinsip pemerataan dan keadilan, Pemerintah Kabupaten Garut turut menerapkan SPM dalam rangka menjamin hak konstitusional masyarakat, dimana SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan memaksimalkan pencapaian SPM di Kabupaten Garut sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Garut telah membentuk Tim Penerapan SPM sebagaimana Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.7-TAPEM/2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana salah satu tugasnya adalah menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Garut.

## **1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadikan acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.

4. Menyediakan langkah – langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam penyusunan target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam mencapai sasaran yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

### 1.3 KONDISI UMUM WILAYAH

#### 1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

**Gambar 1.1**  
**Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut**



Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km<sup>2</sup> (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42

kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

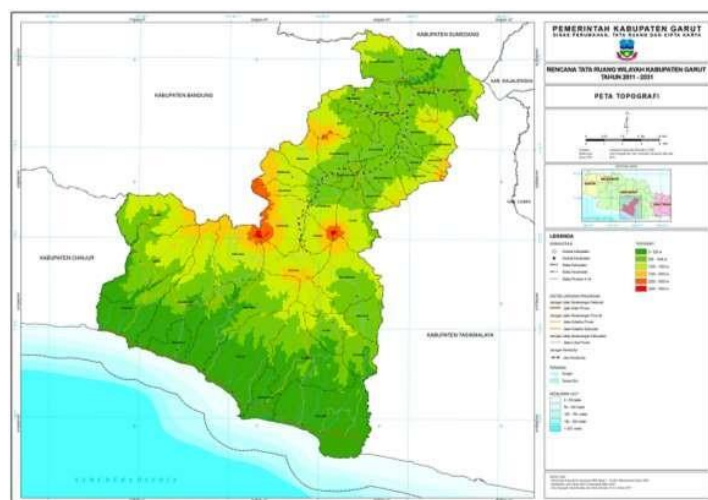
**Gambar 1.2**  
**Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Garut**



## 2. TOPOGRAFI

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara  $0^{\circ}$ - $2^{\circ}$  adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara  $2^{\circ}$ - $15^{\circ}$  adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara  $15^{\circ}$ - $40^{\circ}$  adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas  $40^{\circ}$  adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut.

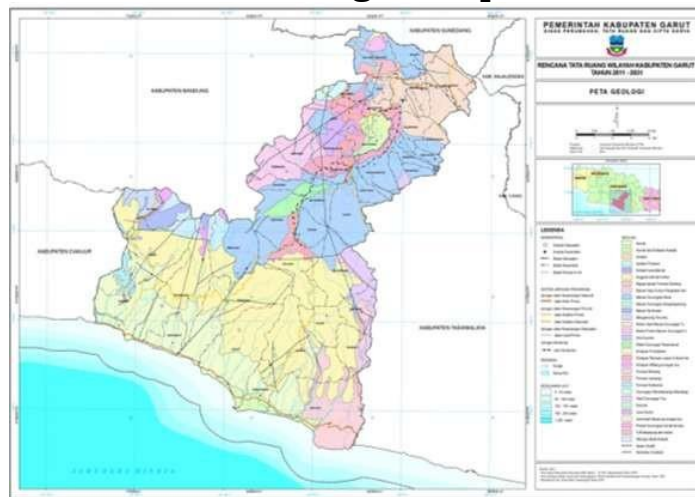
**Gambar 1.3**  
**Kondisi Topografi Kabupaten Garut**



### 3. GEOLOGI

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan berelief kasar, perbukitan berelief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol

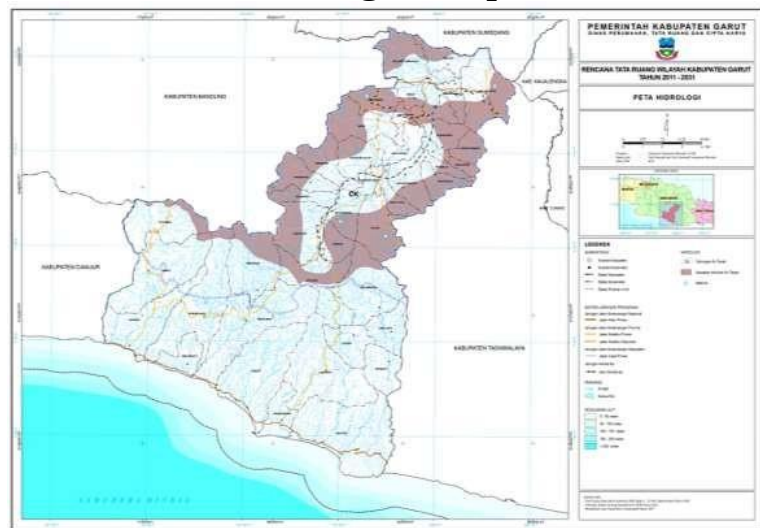
**Gambar 1.4**  
**Kondisi Geologi Kabupaten Garut**



### 4. HIDROLOGI

Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan 101 buah anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara. Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sekitar 700 liter perdetik.

**Gambar 1.5**  
**Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut**

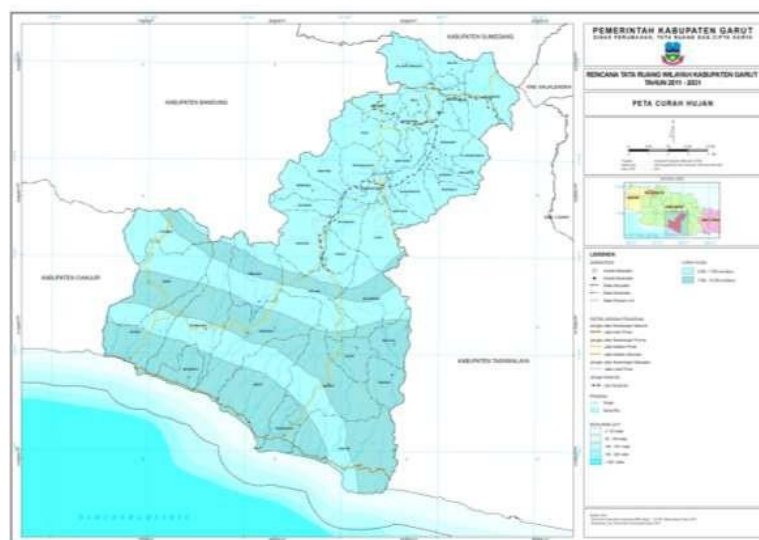


## 5. KLIMATOLOGI

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di Bandung.

Curah hujan rata-rata harian di sekitar Garut berkisar antara 13,6 mm - 27,7 mm atau sekitar 2.589 mm curah hujan rata-rata tahunan dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 3.500-4.000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C-27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun. Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.

**Gambar 1.6**  
**Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut**



## 6. KONDISI PENGGUNAAN LAHAN

Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, dari total luas wilayah 310.705,29 Ha, sebagian besar berupa hutan seluas 73.657,20 Ha (23,71%), kebun/perkebunan seluas 55.752,67 Ha (17,94%), tanah ladang seluas 52.681,37 Ha (16,96%), semak belukar seluas 47.030,36 Ha (15,14%), sawah tadah hujan seluas 40.065,42 Ha atau 12,89%, area pemukiman seluas 19.408,17 Ha (6,25%), sawah irigasi seluas 17.492,23 Ha atau 5,63%, dan sisanya berupa padang rumput, air sungai, tanggul pasir, danau/situ, bangunan, kolam ikan, hutan bakau, empang/tambak, pasir darat, dan mata air.

Tabel 1.1  
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Air Sungai	1.592,39	0,51%
2	Area Pemukiman	19.408,17	6,25%
3	Bangunan	82,83	0,03%
4	Danau/Situ	211,12	0,07%
5	Empang/Tambak	30,56	0,01%
6	Hutan	73.657,21	23,71%
7	Hutan Bakau	31,83	0,01%
8	Kebun/Perkebunan	55.752,67	17,94%
9	Kolam Ikan	35,69	0,01%
10	Mata Air	2,58	0,00%
11	Padang Rumput	2.351,96	0,76%
12	Pasir Darat	5,27	0,00%
13	Sawah Irigasi	17.492,23	5,63%
14	Sawah Tadah Hujan	40.065,42	12,89%
15	Semak Belukar	47.030,36	15,14%
16	Tanah Ladang	52.681,37	16,96%
17	Tanggul Pasir	273,63	0,09%
	<b>Jumlah</b>	<b>310.705,29</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031.

## 7. DEMOGRAFI

Gambaran demografi berdasarkan data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Adminitrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah penduduk pada Semester 4 tahun 2023 mencapai 2.753.949 jiwa atau menurun 5.541 jiwa atau 0,2 % dari tahun 2022 sebanyak 2.759.490 Jiwa

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Jenis Kelamin dan**  
**Kecamatan berdasarkan Data SIAK Tahun 2023**

<b>KODE KEC</b>	<b>NAMA KEC</b>	<b>LAKI - LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
32.05.01	GARUT KOTA	67,053	65,539	132,592
32.05.02	KARANGPAWITAN	74,625	71,660	146,285
32.05.03	WANARAJA	25,950	24,906	50,856
32.05.04	TAROGONG KALER	50,815	49,564	100,379
32.05.05	TAROGONG KIDUL	59,338	58,433	117,771
32.05.06	BANYURESMI	50,085	48,035	98,120
32.05.07	SAMARANG	42,715	40,759	83,474
32.05.08	PASIRWANGI	36,959	35,108	72,067
32.05.09	LELES	45,173	43,379	88,552
32.05.10	KADUNGORA	50,340	47,907	98,247
32.05.11	LEUWIGOONG	25,696	24,749	50,445
32.05.12	CIBATU	39,981	38,160	78,141
32.05.13	KERSAMANAH	21,338	20,402	41,740
32.05.14	MALANGBONG	72,293	68,229	140,522
32.05.15	SUKAWENING	30,742	29,317	60,059
32.05.16	KARANGTENGAH	10,124	9,579	19,703
32.05.17	BAYONGBONG	54,434	51,982	106,416
32.05.18	CIGEDUG	23,514	22,194	45,708
32.05.19	CILAWU	58,493	56,776	115,269
32.05.20	CISURUPAN	54,439	52,182	106,621
32.05.21	SUKARESMI	22,485	21,231	43,716
32.05.22	CIKAJANG	44,782	42,940	87,722
32.05.23	BANJARWANGI	31,280	29,684	60,964
32.05.24	SINGAJAYA	25,298	24,346	49,644
32.05.25	CIHURIP	10,283	9,663	19,946
32.05.26	PEUNDEUY	12,851	12,266	25,117
32.05.27	PAMEUNGPEUK	22,470	21,973	44,443
32.05.28	CISOMPET	28,689	27,316	56,005
32.05.29	CIBALONG	24,739	23,6692	48,408
32.05.30	CIKELET	23,861	22,971	46,832
32.05.31	BUNGBULANG	31,499	29,674	61,173
32.05.32	MEKARMUKTI	9,790	9,640	19,430
32.05.33	PAKENJENG	37,740	36,358	74,098
32.05.34	PAMULIHAN	9,880	9,450	19,330
32.05.35	CISEWU	17,799	17,157	34,956
32.05.36	CARINGIN	17,936	17,134	35,070
32.05.37	TALEGONG	15,626	14,903	30,529
32.05.38	BL. LIMBANGAN	44,358	41,579	85,937
32.05.39	SELAAWI	22,921	21,553	44,474
32.05.40	CIBIUK	19,429	18,049	37,478
32.05.41	PANGATIKAN	22,618	21,617	44,235
32.05.42	SUCINARAJA	16,011	15,464	31,475
<b>TOTAL</b>		<b>1,406,452</b>	<b>1,347,497</b>	<b>2,753,949</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut 2023

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2023 berada di Kecamatan Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota, dan Tarogong Kidul sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pamulihan, Mekarmukti dan Karangtengah.

**Tabel 1.3**  
**Data Kependudukan Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK**  
**Tahun 2019 - 2023**

INDIKATOR	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.284.418	2.514.515	2.628.723	2.759.490	2.753.949
- Laki-Laki (Jiwa)	1.168.329	1.285.225	1.341.442	1.408.225	1.406.452
- Perempuan (Jiwa)	1.095.547	1.116.089	1.229.290	1.287.281	1.351.265
2. Sex Ratio (%)	104,68	104,48	104,2	104,22	104,38
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,19 %	10,07 %	3,4 %	4,97	-0,20
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	735,2	820,35	857,61	900,71	898,46
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	836.954	846.974	870.636	915.327	907.609

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk pada tahun 2023 sebesar 104,38% yang berarti ada sekitar 104 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar 104,22 %. Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2023 sebesar -0,20 % mengalami penurunan tahun 2022.

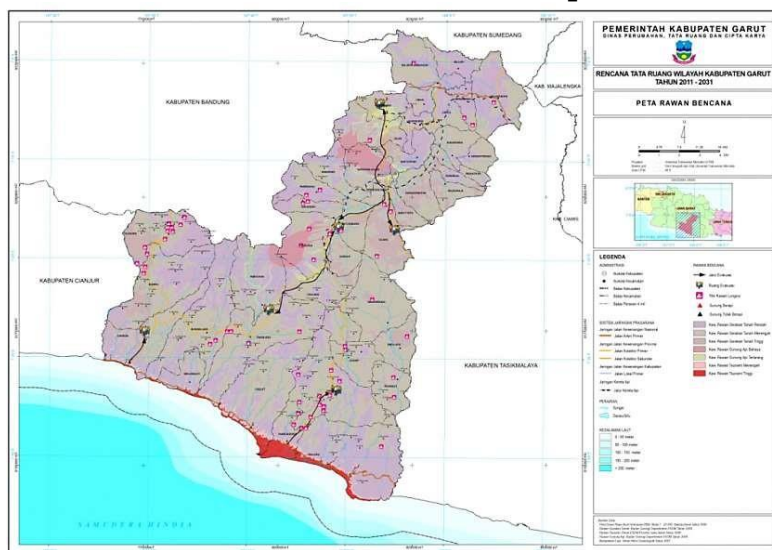
Kepadatan Penduduk pada Tahun 2023 sebesar 898,46 jiwa/Km<sup>2</sup> mengalami penurunan sebesar 2,25 jiwa/Km<sup>2</sup> dari kepadatan penduduk tahun 2022 sebesar 900,71 jiwa/Km<sup>2</sup>, sementara jumlah rumah tangga pada tahun 2023 adalah sebesar 907.609 KK menurun 7.718 dari tahun 2022 yaitu sebanyak 915.327 KK.

## 8. KAWASAN RAWAN BENCANA

Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor.

Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisarupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara komplek Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk.

**Gambar 1.7**  
**Kondisi Peta Rawan Bencana Kabupaten Garut**



### 9. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif, sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Garut mempunyai jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Terakhir pada tahun 2011 telah melakukan penambahan jumlah desa sebanyak 11 (sebelas) desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 s.d. 22 Tahun 2011. Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas mencapai 6,96% dari wilayah Kabupaten Garut atau seluas 21.633,32 Ha, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 Ha atau 0,54%. Sebagai gambaran umum berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah seluruh Kecamatan beserta jumlah desa/kelurahan.

**Tabel 1.4**  
**Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Garut**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel
1	Cisewu	9 desa	22	Samarang	13 desa
2	Caringin	6 desa	23	Pasirwangi	12 desa
3	Talegong	7 desa	24	Tarogong Kidul	7 desa 5 kelurahan
4	Mekarmukti	5 desa	25	Tarogong Kaler	12 desa 1 kelurahan
5	Bungbulang	13 desa	26	Garut Kota	11 kelurahan
6	Pamulihan	5 desa	27	Karangpawitan	16 desa 4 kelurahan
7	Pakenjeng	13 desa	28	Wanaraja	9 desa
8	Cikelet	11 desa	29	Pangatikan	8 desa
9	Pameungpeuk	8 desa	30	Sucinaraja	7 desa
10	Cibalong	11 desa	31	Sukawening	11 desa
11	Cisompet	11 desa	32	Karangtengah	4 desa
12	Peundeuy	6 desa	33	Banyuresmi	15 desa
13	Singajaya	9 desa	34	Leles	12 desa
14	Cihurip	4 desa	35	Leuwigoong	8 desa
15	Banjarwangi	11 desa	36	Cibatu	11 desa
16	Cikajang	12 desa	37	Kersamanah	6 desa
17	Cilawu	18 desa	38	Cibiuk	5 desa
18	Bayongbong	18 desa	39	Kadungora	14 desa
19	Cigedug	5 desa	40	Bl Limbangan	14 desa
20	Cisurupan	17 desa	41	Selaawi	7 desa
21	Sukaesmi	7 desa	42	Malangbong	24 desa
			Total		421 desa dan 21 Kel

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Garut, Tahun 2023.

#### **1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM**

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

**BAB II**  
**KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMANTAUAN PENERAPAN SPM**

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

a. Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					92.90%
<b>1 .</b>	<b>Pendidikan Dasar Usia Dini</b>					91.55%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		85086	85086	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>11.55%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	57.73%
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	71.58	<b>28.42</b>	<b>71.58%</b>
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	43.46	42.4	<b>1.06</b>	<b>97.56%</b>
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	61.6	<b>38.4</b>	<b>61.60%</b>
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	25.21	20.8	<b>4.41</b>	<b>82.51%</b>
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	1	0	<b>1</b>	<b>0.00%</b>
	6 . Indeks distribusi guru	%	0.52	0.36	<b>0.16</b>	<b>69.23%</b>
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	59.36	44.6	<b>14.76</b>	<b>75.13%</b>
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	15.07	0.04	<b>15.03</b>	<b>0.27%</b>
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	0.47	0.29	<b>0.18</b>	<b>61.70%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>345</b>	<b>242</b>	<b>103</b>	<b>519.58%</b>	
<b>2 .</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>					96.03%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		371809	371809	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>16.03%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	80.17%
	<b>SD</b>					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	105.26	100.2	<b>5.06</b>	<b>95.19%</b>
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	99.85	98.49	<b>1.36</b>	<b>98.64%</b>
	3 . Angka partisipasi murni	%	97.65	94.61	<b>3.04</b>	<b>96.89%</b>
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	64.88	<b>35.12</b>	<b>64.88%</b>
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	53.32	<b>46.68</b>	<b>53.32%</b>
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	4.69	3.92	<b>0.77</b>	<b>83.58%</b>
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1.99	1.85	<b>0.14</b>	<b>92.96%</b>
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.11	71.83	<b>2.28</b>	<b>96.92%</b>

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	76.91	68.42	<b>8.49</b>	<b>88.96%</b>
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	22.23	16.5	<b>5.73</b>	<b>74.22%</b>
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.34	0.33	<b>0.01</b>	<b>97.06%</b>
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91.25	<b>8.75</b>	<b>91.25%</b>
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	75.17	0.04	<b>75.13</b>	<b>0.05%</b>
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	65.9	<b>34.1</b>	<b>65.90%</b>
	<b>SMP</b>					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100.81	100.15	<b>0.66</b>	<b>99.35%</b>
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	95.32	95.29	<b>0.03</b>	<b>99.97%</b>
	3 . Angka partisipasi murni	%	79.52	77.06	<b>2.46</b>	<b>96.91%</b>
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	71.99	60.13	<b>11.86</b>	<b>83.53%</b>
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	45.96	40.52	<b>5.44</b>	<b>88.16%</b>
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4.49	4.46	<b>0.03</b>	<b>99.33%</b>
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.97	0.76	<b>0.21</b>	<b>78.35%</b>
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	67.67	65.34	<b>2.33</b>	<b>96.56%</b>
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	68.45	63.38	<b>5.07</b>	<b>92.59%</b>
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	23.23	17	<b>6.23</b>	<b>73.18%</b>
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.32	0.3	<b>0.02</b>	<b>93.75%</b>
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	89.55	<b>10.45</b>	<b>89.55%</b>
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	75.21	0.08	<b>75.13</b>	<b>0.11%</b>
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	72.96	39.2	<b>33.76</b>	<b>53.73%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,765</b>	<b>1,385</b>	<b>380</b>	<b>2244.89%</b>	
<b>3 .</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>					91.10%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		33340	33340	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>11.10%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	55.52%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	86.04	<b>13.96</b>	<b>86.04%</b>
	3 . Angka partisipasi murni	%	0	0	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	34.04	25.9	<b>8.14</b>	<b>76.09%</b>
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	23.26	17.27	<b>5.99</b>	<b>74.25%</b>
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5.84	2.48	<b>3.36</b>	<b>42.47%</b>
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3.6	1.5	<b>2.1</b>	<b>41.67%</b>
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	64.22	57.3	<b>6.92</b>	<b>89.22%</b>
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	62	55.78	<b>6.22</b>	<b>89.97%</b>
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	0	0	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>293</b>	<b>246</b>	<b>47</b>	<b>499.70%</b>	

b. Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					97.17%
1 .	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>					95.99%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>76.07%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	51,844	49,300	2,544	95%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>19.92%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	99.59%
			-1	-2	-3	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	51,844	51,844	0	100.00%
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	4,665,960	4,665,960	0	100.00%
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	51,844	51,844	0	100.00%
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	51,844	51,844	0	100.00%
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	51,844	51,844	0	100.00%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	51,844	51,844	0	100.00%
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	51,844	51,844	0	100.00%
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	51,844	51,844	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	286	286	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,486	1,486	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	74	74	0	100.00%
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	51,844	49,300	2,544	95.09%
	<b>JUMLAH</b>	<b>5,082,558</b>	<b>5,080,014</b>	<b>2,544</b>	<b>1195.09%</b>	
2 .	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>					91.81%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>71.81%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	49,488	44,424	5,064	90%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	100.00%
			-1	-2	-3	
	1 . Formulir Partograf	Formulir	49,488	49,488	0	100.00%
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	49,488	49,488	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	49,488	49,488	0	100.00%
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	286	286	0	100.00%
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,486	1,486	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	74	74	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>150,310</b>	<b>150,310</b>	<b>0</b>	<b>600.00%</b>	
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>					94.76%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>74.76%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	47,131	44,042	3,089	93%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b> -1	<b>Jumlah yang terlayani</b> -2	<b>Jumlah yang belum terlayani</b> -3	100.00%
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	47,131	47,131	0	100.00%
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	23,566	23,566	0	100.00%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	9,426	9,426	0	100.00%
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	47,131	47,131	0	100.00%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	47,131	47,131	0	100.00%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	47,131	47,131	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	247	247	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,486	1,486	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	74	74	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>223,323</b>	<b>223,323</b>	<b>0</b>	<b>900.00%</b>	
<b>4 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>					90.33%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>70.33%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	227,679	200,145	27,534	88%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b> -1	<b>Jumlah yang terlayani</b> -2	<b>Jumlah yang belum terlayani</b> -3	100.00%
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	22,768	22,768	0	100.00%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	227,679	227,679	0	100.00%
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	227,679	227,679	0	100.00%
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	95,513	95,513	0	100.00%
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	683,037	683,037	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	43,936	43,936	0	100.00%
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	43,936	43,936	0	100.00%
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	175,744	175,744	0	100.00%
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	87,872	87,872	0	100.00%
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	131,808	131,808	0	100.00%
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	43,699	43,699	0	100.00%
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	43,699	43,699	0	100.00%
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	43,699	43,699	0	100.00%
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	43,699	43,699	0	100.00%
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	43,699	43,699	0	100.00%
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	526,521	526,521	0	100.00%
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	509	509	0	100.00%
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	247	247	0	100.00%
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,486	1,486	0	100.00%
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	148	148	0	100.00%
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	67	67	0	100.00%
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	21,450	21,450	0	100.00%
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	5,167	5,167	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,514,062</b>	<b>2,514,062</b>	<b>0</b>	<b>2300.00%</b>	
<b>5 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>					97.06%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>77.06%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	449,248	432,756	16,492	96%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			-1	-2	-3	100.00%
	1 . Buku raport sehatanku	Buku	449,248	449,248	0	100.00%
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	449,248	449,248	0	100.00%
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	449,248	449,248	0	100.00%
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	67	67	0	100.00%
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	67	67	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	286	286	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,486	1,486	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,218	1,218	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	67	67	0	100.00%
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	130	130	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	21,450	21,450	0	100.00%
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	2,404	2,404	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,374,919</b>	<b>1,374,919</b>	<b>0</b>	<b>1200.00%</b>	
<b>6 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>					98.61%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>78.61%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1,080,873	1,062,148	18,725	98%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani -1</b>	<b>Jumlah yang terlayani -2</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani -3</b>	100.00%
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	67	67	0	100.00%
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	67	67	0	100.00%
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	67	67	0	100.00%
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	67	67	0	100.00%
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	67	67	0	100.00%
	6 . Alat : Glukometer	Unit	67	67	0	100.00%
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	67	67	0	100.00%
	8 . Alat : Lancet	Unit	67	67	0	100.00%
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	67	67	0	100.00%
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	67	67	0	100.00%
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	67	67	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	174	174	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,486	1,486	0	100.00%
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,218	1,218	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	67	67	0	100.00%
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	130	130	0	100.00%
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	7,225	7,225	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>11,037</b>	<b>11,037</b>	<b>0</b>	<b>1700.00%</b>	
<b>7 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>					98.86%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>78.86%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	335,163	330,399	4,764	99%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani -1</b>	<b>Jumlah yang terlayani -2</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani -3</b>	100.00%
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	335,163	335,163	0	<b>100.00%</b>
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	335,163	335,163	0	<b>100.00%</b>
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	335,163	335,163	0	<b>100.00%</b>
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	174	174	0	<b>100.00%</b>
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1,486	1,486	0	<b>100.00%</b>
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,218	1,218	0	<b>100.00%</b>
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	67	67	0	<b>100.00%</b>
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	130	130	0	<b>100.00%</b>
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	7,225	7,225	0	<b>100.00%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,015,789</b>	<b>1,015,789</b>	<b>0</b>	<b>900.00%</b>	
<b>8 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	94,429	94,429	0	<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani -1</b>	<b>Jumlah yang terlayani -2</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani -3</b>	100.00%
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	67	67	0	<b>100.00%</b>
	2 . Tensimeter	Unit	509	509	0	<b>100.00%</b>
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	67	67	0	<b>100.00%</b>
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	142	142	0	<b>100.00%</b>
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	509	509	0	<b>100.00%</b>
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	509	509	0	<b>100.00%</b>
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	67	67	0	<b>100.00%</b>
	8 . Obat Hipertensi	Paket	94,429	94,429	0	<b>100.00%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>96,299</b>	<b>96,299</b>	<b>0</b>	<b>800.00%</b>	
<b>9 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>					100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	16,367	16,367	0	<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b> -1	<b>Jumlah yang terlayani</b> -2	<b>Jumlah yang belum terlayani</b> -3	100.00%
	1 . Alat : Glukometer	Unit	509	509	0	<b>100.00%</b>
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	600,100	600,100	0	<b>100.00%</b>
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	600,100	600,100	0	<b>100.00%</b>
	4 . Alat : Lancet	Unit	600,100	600,100	0	<b>100.00%</b>
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	67	67	0	<b>100.00%</b>
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	67	67	0	<b>100.00%</b>
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	67	67	0	<b>100.00%</b>
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	509	509	0	<b>100.00%</b>
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	509	509	0	<b>100.00%</b>
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	67	67	0	<b>100.00%</b>
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	130	130	0	<b>100.00%</b>
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	16,367	16,367	0	<b>100.00%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,818,592</b>	<b>1,818,592</b>	<b>0</b>	<b>1200.00%</b>	
<b>10 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	2,661	2,661	0	<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b> -1	<b>Jumlah yang terlayani</b> -2	<b>Jumlah yang belum terlayani</b> -3	100.00%
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	67	67	0	<b>100.00%</b>
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	134	134	0	<b>100.00%</b>
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	67	67	0	<b>100.00%</b>
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	67	67	0	<b>100.00%</b>
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	67	67	0	<b>100.00%</b>

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	67	67	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	176	176	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>700.00%</b>	
<b>11 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>					98.57%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	40,214	40,214	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.57%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani -1</b>	<b>Jumlah yang terlayani -2</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani -3</b>	92.85%
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	119	119	0	100.00%
	2 . Reagen Zn TB	Paket	699	699	0	100.00%
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	311,560	311,560	0	100.00%
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	136,140	82,261	53,879	60.42%
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	38,640	18,000	20,640	46.58%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	119	119	0	100.00%
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	119	119	0	100.00%
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	119	119	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	119	119	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	119	119	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	10	10	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	75	75	0	100.00%
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	279	279	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>488,117</b>	<b>413,598</b>	<b>74,519</b>	<b>1207.00%</b>	
<b>12 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	65,254	65,254	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00%
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	1,000	1,000	0	100.00%
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	65,254	65,254	0	100.00%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	65,254	65,254	0	100.00%
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	74	74	0	100.00%
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	74	74	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	74	74	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	74	74	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	74	74	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	74	74	0	100.00%
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	40	40	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>131,992</b>	<b>131,992</b>	<b>0</b>	<b>1000.00%</b>	

c. Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					78.09%
1 .	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>					90.04%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>72.03%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2,759,490	2,484,730	274,760	90%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.01%</b>
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	90.04%
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan	Sambungan Rumah/SR	165,569,400	149,083,800	16,485,600	90.04%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	pokok minimal 60 liter/orang/hari)					
	<b>2</b> . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	915,327	824,189	<b>91,138</b>	<b>90.04%</b>
	<b>3</b> . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	151,566,480	136,475,130	<b>15,091,350</b>	<b>90.04%</b>
	<b>4</b> . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	842,036	758,195	<b>83,841</b>	<b>90.04%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>318,893,243</b>	<b>287,141,314</b>	<b>31,751,929</b>	<b>360.16%</b>	
<b>2 .</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>					66.14%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>54.25%</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	915,327	620,670	<b>294,657</b>	<b>68%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>11.90%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	59.49%
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	
	<b>1</b> . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	915,327	620,670	<b>294,657</b>	<b>67.81%</b>
	<b>2</b> . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	613,699	426,856	<b>186,843</b>	<b>69.55%</b>

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	0	0	0	0%
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	613,699	3,577	610,122	0.58%
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1	1	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,142,726</b>	<b>1,051,104</b>	<b>1,091,622</b>	<b>237.94%</b>	

d. Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					100.00%	
1 .	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>					100.00%	
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		692	692	0	100.00%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					20.00%	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi</b>	100.00%	
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100.00 %	
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	677	677	0	100.00 %	
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	13	13	0	100.00 %	
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	1	1	0	100.00 %	
	<b>JUMLAH</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>400.00%</b>		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
2 .	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					100.00%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		5	5	0	<b>100.00%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	1	1	0	<b>100.00</b>	
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	1	1	0	<b>100.00 %</b>	
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	3	3	0	<b>100.00 %</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>300.00%</b>		

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>		TUNTAS UTAMA			98.66%
1 .	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>					98.66%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		1	1	0	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.66%</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	93.31%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	443	290	153	<b>65.46%</b>
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0	<b>100.00%</b>

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	356	336	20	94.38%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2	2	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	1	0	100.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	1	0	100.00%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>			TUNTAS UTAMA			91.64%
1 .	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>					88.08%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>71.07%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		2,232,615	1,983,480	249135	<b>88.84%</b>
			<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>17.01%</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	85.04%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	941,149	941,149	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	2,232,615	1,965,744	266871	<b>88.05%</b>

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	887	462	425	52.09%
2 .	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>					86.85%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>70.44%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		2,232,615	1,965,744	266871	88.05%
		<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>16.41%</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	82.06%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	3,387	2,576	811	76.06%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	2,232,615	1,965,744	266871	88.05%
3 .	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>					100.00%
	ya	Tidak Terjadi Bencana				
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		2,174	2,174	0	100.00%
		<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	0	0	0	0%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1,671	1,671	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	5	5	0	100.00%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
			TUNTAS MADYA			87.27%
1 .	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>					87.27%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>75.76%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		491	465	26	<b>94.70%</b>
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>						<b>11.50%</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	57.52%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	491	465	26	94.70%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	10	9	1	90.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	uinit	54	14	40	25.93%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	504	98	406	19.44%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0	1	-1	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	0	0%

f. Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					99.33%
1 .	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	334	334	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			-1	-2	-3	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	13	13	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	72	72	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	72	72	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	50	50	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	7	7	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	8	8	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	14	14	0	100.00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	22	22	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	18	18	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	13	13	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	9	9	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	Orang	21	21	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>1300.00%</b>	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
2 .	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	281	281	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			-1	-2	-3	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	13	13	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	72	72	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	72	72	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	7	7	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	13	13	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	21	21	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	36	36	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	13	13	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	9	9	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan	Orang	9	9	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>1200.00%</b>	
3 .	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	271	271	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			-1	-2	-3	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	13	13	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	72	72	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	72	72	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	7	7	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	8	8	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	14	14	0	100.00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	22	22	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	18	18	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	13	13	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	9	9	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>1300.00%</b>	
<b>4 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>					100.00%
	tidak	Ya Terjadi Bencana				
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	96	96	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			-1	-2	-3	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	4	4	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	24	24	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	24	24	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	4	4	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	7	7	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	4	4	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	7	7	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	7	7	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3	3	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>1200.00%</b>	
5 .	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>					96.67%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3,000	3,000	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>16.67%</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			-1	-2	-3	83.33%
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	3,000	3,000	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	400	400	0	100.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	1	0	100.00%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1	1	0	100.00%
	6 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,403</b>	<b>3,403</b>	<b>0</b>	<b>500.00%</b>	

g. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Garut ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP perlu pemisahan;

- 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;
- 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan;
- 4) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah;
- 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan;
- 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah.
- 7) Pengawas untuk jenjang PAUD kekurangan personel dikarenakan adanya yang pensiun sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga PAUD negeri dan swasta pada 10 kecamatan.

b. Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
- 2) Sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi;
- 3) Belum semua pelaksanaan program melakukan penghitungan kebutuhan sesuai PMK No. 4 Tahun 2019;
- 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskreneng kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjarangan

c. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
- 3) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 4) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- 5) Minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompetensi;
- 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;

- 7) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional;
- 8) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya;
- 9) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.

d. Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 3) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 4) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 5) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 6) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai; dan
- 7) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

f. Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- 5) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- 7) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM

### BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pencapaian pemenuhan SPM, penentuan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, maka diperlukan penguatan Tim penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah

#### A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan rencana aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

##### 1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Garut bidang urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan		
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan		
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan		
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dana tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan		
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru		
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan		
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan		
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan		
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik		
			Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	
		2		Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		
		3		Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan		
		2	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik
					2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Pengawas

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendaftaran warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	
1	2	3	4		5	
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan	
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	
			Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan		

## 2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

### 3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M2/Hari
			11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M2/Hari
			12	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
				ketentraman dan ketertiban umum			
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang		
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen		
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit		
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen		
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan		
			Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan	
				2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan	
				3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan	
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan		
			1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen		
		2	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
					Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten			Orang			
3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten			Dokumen			
4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Unit			
5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan			Dokumen			
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			Kawasan			
7	Penanganan pasca bencana kabupaten						
8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten			Orang			

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN		
1	2	3	4		5		
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen		
			10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang		
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen		
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga		
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan		
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen		
			3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang		
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang		
			5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan		
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen		
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen		
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen		
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen		
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen		
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan		
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen		
		3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
					2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
					3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
					4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
					5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri				Dokumen		
7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran				Dokumen		

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			8 Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
			9 Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
			10 Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	2 Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1 Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1 Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
			2 Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3 Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1 Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2 Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3 Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4 Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanaan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

B. Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM

1. Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan

Kabupaten/Kota													
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	PENCAPAIAN SPM									
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								23,492,879,800	23,492,879,800	23,492,879,800	23,492,879,800	23,492,879,800	23,492,879,800
<b>1</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>			<b>80%</b>	<b>69.65 %</b>	<b>20%</b>	<b>17.87 %</b>	-	-	-	-	-	-
a	Angka Partisipasi Sekolah	%	<b>71.58 %</b>			<b>100%</b>	<b>72.94 %</b>						
b	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	<b>97.56 %</b>			<b>100%</b>	<b>90.19 %</b>						
c	Pertumbuhan Pendidik PAUD Di S1/DIV	%	<b>61.60 %</b>			<b>43.46%</b>	<b>99.72 %</b>						
d	Rasio Pengawas Sekolah Untuk PAUD	%	<b>82.51 %</b>			<b>79.4%</b>	<b>93.69 %</b>						
e	Kecukupan Formasi Guru ASN	%	<b>0.00 %</b>	-	-	<b>25.21%</b>	<b>79.65 %</b>						
f	Indeks Distribusi Guru	%	<b>69.23 %</b>	-	-	<b>15%</b>	<b>99.80 %</b>						
g	Proporsi PTK Bersertifikat	%	<b>75.13 %</b>			<b>0,6%</b>	<b>98.33 %</b>						
h	Proporsi PTK Penggerak	%	<b>0.27 %</b>	-	-	<b>59.36%</b>	<b>94.68 %</b>						
i	Pengalaman Pelatihan Guru	%	<b>61.70 %</b>			<b>0.45%</b>	<b>75.00 %</b>						
<b>2</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>			<b>80 %</b>	<b>79.17 %</b>	<b>80%</b>	<b>79.17 %</b>	-	-	-	-	-	-

Kabupaten/Kota													
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	PENCAPAIAN SPM									
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>SD</b>							-	-	-	-	-	-
a	Angka Partisipasi Kasar	%	95.19 %			105.26	96.24 %						
b	Angka Partisipasi Sekolah	%	98.64 %			99.85	98.57 %						
c	Angka Partisipasi Murni	%	96.89 %			100	76.11						
d	Kemampuan Literasi	Nilai	64.88			100	72.28						
e	Kemampuan Numerasi	Nilai	53.32			4.69	3.16						
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	3.92			1.99	2.36						
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	1.85			77.11	76.91						
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	71.83			76.91	73.59						
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	%	88.96 %			68.82	85.47 %						
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%	74.22 %			22.23	67.34 %						
k	Indeks Distribusi Guru	%	97.06 %			0.34	73.53 %						

Kabupaten/Kota													
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	PENCAPAIAN SPM									
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%	91.25 %			35.05	88.59 %						
m	Proporsi PTK Penggerak	%	0.05 %			0.08	50.00 %						
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%	65.90 %			-							
	<b>SMP</b>							-	-	-	-	-	-
a	Angka Partisipasi Kasar	%	99.35 %			100.81	99.50 %						
b	Angka Partisipasi Sekolah	%	99.97 %			99.32	99.09 %						
c	Angka Partisipasi Murni	%	96.91 %			-	-						
d	Kemampuan Literasi	Nilai	60.13			71.99	70.64						
e	Kemampuan Numerasi	Nilai	40.52			70.96	070.52						
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	4.46			4.49	3.96						
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	0.76			2.97	2.16						
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	65.34			68.77	68.77						
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	%	92.59 %			71.45	98.05 %						
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%	73.18 %			23.23	43.95 %						
k	Indeks Distribusi Guru	%	93.75 %			0.32	93.75 %						
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%	89.55 %			48.68	89.73 %						

Kabupaten/Kota													
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	PENCAPAIAN SPM									
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
m	Proporsi PTK Penggerak	%	0.11 %			0.18	44.44 %						
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%	53.73 %										
<b>3</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>			80%	38.77 %			-	-	-	-	-	-
a	Angka Partisipasi Kasar	%	-			-	-						
b	Angka Partisipasi Sekolah	%	86.04 %			28.72	86.07 %						
c	Angka Partisipasi Murni	%	-			-	-						
d	Kemampuan Literasi	Nilai	25.9			46	44						
e	Kemampuan Numerasi	Nilai	17.27			45	42.67						
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2.48			6.50	6.61						
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	1.5			3.75	9.88						
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	57.3			56	62.12						
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai	55.78			60.91	52.90						























Provinsi																
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	e. Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), Instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity Daily Living (ADLBARTHEL))	Faskes				67	67									
	f. Buku kesehatan lansia/Aplikasi pencatatan terkait lainnya	Faskes				67	67									
	g. Media KIE	Faskes				75	75									
	h. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				1.080	511					-				
	i. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				2.717	2.072									
	j. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				3.051	3.010									
	k. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				111	100									
	l. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				127	127									
	m. Kader kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang				21.670	21.670									
<b>8</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>			108.360	76.471	20%	16,73%	125.000.000	Dau Terarah	APBD	Dinkes	137.500.000	151.250.000	166.375.000	183.012.500	<b>201.313.750</b>













Provinsi																
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	h. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				76	76									
	i. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				127	127									
	j. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				80	80									

### 3. Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR		19.278	13.281			26.150.876.800	diisi sumber dana lainnya	APBD/APBN	Dinas PUPR	30.100.000.000	35.600.000.000	37.100.000.000	37.100.000.000	37.100.000.000
a	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR				593.397	394801	13.470.877.000		APBD/APBN	Dinas PUPR	600.000.000	600.000.000			
b	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga				3.259	2169	13.470.877.000		APBD/APBN	Dinas PUPR	15.500.000.000	17.000.000.000			

Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga			563.261	402.074		12.679.999.800		APBD/APBN	Dinas PUPR	14.000.000.000	18.000.000.000			
d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga			3.094	2.209		12.679.999.800		APBD/APBN	Dinas PUPR					
	<b>Total</b>				<b>6.353</b>	<b>4.378</b>		<b>26.150.876.800</b>								
<b>2</b>	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR</b>			744	535			4.721.843.800			Dinas PUPR	12.800.000.000	17.000.000.000	17.400.000.000	17.400.000.000	17.400.000.000
a	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			389	200		1.572.999.800		APBD/APBN	Dinas PUPR	6.000.000.000	8.400.000.000			
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga			87	50		1.572.999.800		APBD/APBN	Dinas PUPR	800.000.000	800.000.000			
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga									Dinas PUPR					



Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (form 4.A.4)	Dokumen										200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	2. Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (form 4.A.5)	Dokumen										200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	3. Pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (form 4.A.6)	Dokumen										100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	4. Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah (form 4.A.10)	Dokumen										200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	5. Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten (form 4.A.11)	Dokumen										100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	6. Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten (<10 ha) (form 4.A.12)	Dokumen										100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	7. Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten (form 4.A.13)	Dokumen										100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	8. Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (form 4.B.3)	Dokumen										75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
	9. Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten (form 4.B.4)	Dokumen										75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00



Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	3													

5. Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>									APBD	SATPOL PP					
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	443	311	236	311	236	1.409.058.700		APBD		2.019.394.500	4.840.627.570	4.840.627.570	4.840.627.570	4.840.627.570
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	1	1	1	1	1			APBD						



Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>							-		APBD	BPBD	1.138.735.500	1.252.609.050	1.377.869.955	1.515.656.951	1.667.222.646
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen		1	1	1	1	-	-			318.425.000	350.267.500	385.294.250	423.823.675	466.206.043
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang		1.237	1.237	1.237	1.237	-	-			226.109.000	248.719.900	273.591.890	300.951.079	331.046.187
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang		524	524	524	524	-	-			325.000.000	357.500.000	393.250.000	432.575.000	475.832.500
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit		462	462	462	462	-	-			269.201.500	296.121.650	325.733.815	358.307.197	394.137.916
3	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>							1.129.593.162	-	APBD	BPBD	729.187.901	802.106.691	882.317.360	970.549.096	1.067.604.006

Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit		871	871	871	871	778.070.762	-			369.187.901	406.106.691	446.717.360	491.389.096	540.528.006
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang		120	120	120	120	351.522.400	-			360.000.000	396.000.000	435.600.000	479.160.000	527.076.000
<b>4</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>							<b>421.289.238</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>	<b>485.120.283</b>	<b>533.632.311</b>	<b>586.995.542</b>	<b>645.695.097</b>	<b>710.264.606</b>
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko		1	1	1	1	-	-			50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang		1.237	1.237	1.237	1.237	234.140.338	-			235.115.283	258.626.811	284.489.492	312.938.442	344.232.286
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen		1	1	1	1	187.148.900	-			200.005.000	220.005.500	242.006.050	266.206.655	292.827.321

Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan		1	1	1	1	-	-			-				
												-				
5	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>							4.924.542.936				11.379.590.136	12.517.549.150	13.769.304.065	15.136.234.472	16.649.857.920
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	473	156	156	100%	100%	2.800.000.000		APBD	DISDAMKAR	3.080.000.000	3.388.000.000	3.726.800.000	4.099.480.000	4.509.428.000
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	9	9	9	10	9	150.472.000		APBD	DISDAMKAR	165.519.200	182.071.120	200.278.232	220.306.055	242.336.661

Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	10	10	10	100%	10	1.721.769.336		APBD	DISDAMKAR	4.801.769.336	5.281.946.270	5.810.140.897	6.391.154.987	7.030.270.486
d	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	98	90	90	100%	90	252.301.600		APBD	DISDAMKAR	3.332.301.600	3.665.531.760	4.032.084.936	4.425.293.430	4.867.822.773
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	666	598	598	100%	100%	-		APBD	DISDAMKAR	-	-	-	-	-

Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	6	-	-	100%	-	-		APBD	DISDAMKAR	-	-	-	-	-

### 6. Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial

Kabupaten/Kota																
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					2025	2026	2027	2028	2029			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial</b>							<b>327.250.136,55</b>	376.725.150,2050	414.397.665,2255	455.837.432	501.421.175	551.563.292			
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang		223	223	223	223	14.634.375,00	16.097.812,5000	17.707.593,75	19.478.353,13	21.426.188,44	23.568.807,28			
b	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	orang		43	43	43	43	96.079.269,58	105.687.196,5380	116.255.916,19	127.881.507,81	140.669.658,59	154.736.624,45			
c	Penyediaan Permakanan	orang		96	96	96	96	55.828.800,00	61.411.680,0000	67.552.848,00	74.308.132,80	81.738.946,08	89.912.840,69			
d	Penyediaan Sandang	orang		96	96	96	96	38.963.792,64	42.860.171,9040	47.146.189,09	51.860.808,00	57.046.888,80	62.751.577,68			

	Kabupaten/Kota												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)				2025	2026	2027	2028	2029	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs		40	40	40	40	54.656.033	60.121.635,8270	66.133.799,41	72.747.179,35	80.021.897,29	88.024.087,01
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		20	20	20	20	-	16.750.000,0000	18.425.000,00	20.267.500,00	22.294.250,00	24.523.675,00
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang		8	8	8	8	26.374.539,13	29.011.993,0430	31.913.192,35	35.104.511,58	38.614.962,74	42.476.459,01
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang		12	12	12	12	8.021.052,63	8.823.157,8930	9.705.473,68	10.676.021,05	11.743.623,16	12.917.985,47
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang		6	6	6	6	1.155.000,00	1.270.500,0000	1.397.550,00	1.537.305,00	1.691.035,50	1.860.139,05
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang		36	36	36	36	25.335.000,00	27.868.500,0000	30.655.350,00	33.720.885,00	37.092.973,50	40.802.270,85
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		6	6	6	6	1.625.000,00	1.787.500,0000	1.966.250,00	2.162.875,00	2.379.162,50	2.617.078,75
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		6	6	6	6	1.425.000,00	1.567.500,0000	1.724.250,00	1.896.675,00	2.086.342,50	2.294.976,75
m	Layanan Rujukan	orang		7	7	7	7	3.152.275,00	3.467.502,5000	3.814.252,75	4.195.678,03	4.615.245,83	5.076.770,41
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar</b>	orang						<b>181.657.243,51</b>	<b>216.572.967,86</b>	238.230.265	262.053.291	288.258.620	317.084.482

	Kabupaten/Kota												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)				2025	2026	2027	2028	2029	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>di Luar Panti Sosial</b>												
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang		223	223	223	223	14.634.375,00	16.097.812,5000	17.707.593,75	19.478.353,13	21.426.188,44	23.568.807,28
b	Penyediaan Permakanan	orang		34	34	34	34	19.772.700,00	21.749.970,0000	23.924.967,00	26.317.463,70	28.949.210,07	31.844.131,08
c	Penyediaan Sandang	orang		34	34	34	34	13.799.676,56	15.179.644,2160	16.697.608,64	18.367.369,50	20.204.106,45	22.224.517,10
d	Penyediaan Alat Bantu	orang		0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		10	10	10	10	-	16.750.000,0000	18.425.000,00	20.267.500,00	22.294.250,00	24.523.675,00
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang		0	0	0	0	-	- ,00	-	-	-	-
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang		7	7	7	7	4.678.947,37	5.146.842,1070	5.661.526,32	6.227.678,95	6.850.446,84	7.535.491,53
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		6	6	6	6	1.155.000,00	1.270.500,0000	1.397.550,00	1.537.305,00	1.691.035,50	1.860.139,05
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		36	36	36	36	25.335.000,00	27.868.500,0000	30.655.350,00	33.720.885,00	37.092.973,50	40.802.270,85
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		6	6	6	6	1.625.000,00	1.787.500,0000	1.966.250,00	2.162.875,00	2.379.162,50	2.617.078,75
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		6	6	6	6	1.425.000,00	1.567.500,0000	1.724.250,00	1.896.675,00	2.086.342,50	2.294.976,75

	Kabupaten/Kota												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)				2025	2026	2027	2028	2029	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Layanan Rujukan	orang		7	7	7	7	3.152.275	3.467.502,5000	3.814.252,75	4.195.678,03	4.615.245,83	5.076.770,41
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		43	43	43	43	96.079.270	105.687.196,5380	116.255.916,19	127.881.507,81	140.669.658,59	154.736.624,45
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		0	0	-	-			-	-	-	-
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		0	0	-	-			-	-	-	-
3	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang						<b>313.586.128,41</b>	<b>361.694.741,25</b>	397.864.215	437.650.637	481.415.701	529.557.271

	Kabupaten/Kota												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)				2025	2026	2027	2028	2029	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang		223	223	223	223	14.634.375,00	16.097.812,50	17.707.593,75	19.478.353,13	21.426.188,44	23.568.807,28
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		43	43	43	43	96.079.269,58	105.687.196,54	116.255.916,19	127.881.507,81	140.669.658,59	154.736.624,45
c	Penyediaan Permakanan	orang		96	96	96	96	55.828.800,00	61.411.680,00	67.552.848,00	74.308.132,80	81.738.946,08	89.912.840,69
d	Penyediaan Sandang	orang		96	96	96	96	38.963.792,64	42.860.171,90	47.146.189,09	51.860.808,00	57.046.888,80	62.751.577,68
e	Penyediaan Alat Bantu	orang		30	30	30	30	40.992.024,43	45.091.226,87	49.600.349,56	54.560.384,52	60.016.422,97	66.018.065,26
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		20	20	20	20	-	16.750.000,00	18.425.000,00	20.267.500,00	22.294.250,00	24.523.675,00
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang		8	8	8	8	26.374.539,13	29.011.993,04	31.913.192,35	35.104.511,58	38.614.962,74	42.476.459,01
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang		12	12	12	12	8.021.052,63	8.823.157,89	9.705.473,68	10.676.021,05	11.743.623,16	12.917.985,47
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		6	6	6	6	1.155.000,00	1.270.500,00	1.397.550,00	1.537.305,00	1.691.035,50	1.860.139,05
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		36	36	36	36	25.335.000,00	27.868.500,00	30.655.350,00	33.720.885,00	37.092.973,50	40.802.270,85
k	Pemberian Pelayanan	orang		6	6	6	6	1.625.000,00	1.787.500,00	1.966.250,00	2.162.875,00	2.379.162,50	2.617.078,75

	Kabupaten/Kota												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penelusuran Keluarga												
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		6	6	6	6	1.425.000,00	1.567.500,00	1.724.250,00	1.896.675,00	2.086.342,50	2.294.976,75
m	Layanan Rujukan	orang		7	7	7	7	3.152.275,00	3.467.502,50	3.814.252,75	4.195.678,03	4.615.245,83	5.076.770,41
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		0	0	0	0		-	-	-	-	-
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		0	0	0	0		-	-	-	-	-
4	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	orang						<b>103.893.691,54</b>	131.033.061	144.136.367	158.550.003	174.405.004	191.845.504

	Kabupaten/Kota												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)				2025	2026	2027	2028	2029	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang		75	75	75	75	4.921.875,00	5.414.062,50	5.955.468,75	6.551.015,63	7.206.117,19	7.926.728,91
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		15	15	15	15	33.516.024,27	36.867.626,70	40.554.389,37	44.609.828,30	49.070.811,13	53.977.892,25
c	Penyediaan Permakanan	orang		24	24	24	24	13.957.200,00	15.352.920,00	16.888.212,00	18.577.033,20	20.434.736,52	22.478.210,17
d	Penyediaan Sandang	orang		24	24	24	24	9.740.948,16	10.715.042,98	11.786.547,27	12.965.202,00	14.261.722,20	15.687.894,42
e	Penyediaan Alat Bantu	orang		0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		10	10	10	10	-	16.750.000,00	18.425.000,00	20.267.500,00	22.294.250,00	24.523.675,00
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang		7	7	7	7	23.077.721,74	25.385.493,91	27.924.043,31	30.716.447,64	33.788.092,40	37.166.901,64
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang		7	7	7	7	4.678.947,37	5.146.842,11	5.661.526,32	6.227.678,95	6.850.446,84	7.535.491,53
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		6	6	6	6	1.155.000,00	1.270.500,00	1.397.550,00	1.537.305,00	1.691.035,50	1.860.139,05
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		12	12	12	12	8.445.000,00	9.289.500,00	10.218.450,00	11.240.295,00	12.364.324,50	13.600.756,95

	Kabupaten/Kota												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)				2025	2026	2027	2028	2029	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		6	6	6	6	1.625.000,00	1.787.500,00	1.966.250,00	2.162.875,00	2.379.162,50	2.617.078,75
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		6	6	6	6	1.425.000,00	1.567.500,00	1.724.250,00	1.896.675,00	2.086.342,50	2.294.976,75
m	Layanan Rujukan	orang		3	3	3	3	1.350.975,00	1.486.072,50	1.634.679,75	1.798.147,73	1.977.962,50	2.175.758,75
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
5	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana</b>	orang						884.156.300	1.350.000.000	1.550.000.000	1.705.000.000	1.875.500.000	2.063.050.000

	Kabupaten/Kota												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					2025	2026	2027	2028	2029
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>												
a	Penyediaan Permakanan	orang		3000	3000	3000	3003	722.396.300	650.000.000	650.000.000	715.000.000	786.500.000	865.150.000
b	Penyediaan Sandang	orang		400	400	400	400	161.760.000	250.000.000	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit							450.000.000	450.000.000	495.000.000	544.500.000	598.950.000
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang								100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang								100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
    - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SPM**

Dalam rangka pencapaian mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, maka diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah

#### **A. Pemantauan dan Evaluasi SPM**

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan.

3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, untuk memastikan apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.  
Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Garut, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat

dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
    - a. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
    - b. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
    - c. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan?
    - d. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
2. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
  - 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan

koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

3. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
  - 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
  
4. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
  - 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  - 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paripabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautakah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
  - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
  - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
  - 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
  - 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali

## B. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
  - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan

dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

**c. Permasalahan SPM** bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan?

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dokmen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Garut Tahun 2024-2029 ini disusun sebagai pedoman dan arah pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Garut di Tahun 2024-2029. Dokumen Rencana Aksi ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun kedepan. Dokumen Rencana Aksi ini terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam pemenuhan SPM dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan SPM serta dapat mempercepat pencapaian target SPM pada setiap urusan pelayanan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

#### **5.2 Saran**

1. Perlunya dilakukan sosialisasi terkait tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Garut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dengan harapan dapat memperdalam pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Garut
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Garut dalam pemahaman terkait dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Garut secepatnya mengoordinasikan pemenuhan pelaksanaan rencana aksi daerah, guna pemenuhan penerapan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, dengan harapan dapat mengakselerasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

